



Judul : BNPB Tidak Masuk : RUU Bencana Alam Terancam Didrop
Tanggal : Selasa, 01 Maret 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

BNPB Tidak Masuk RUU Bencana Alam Terancam Didrop

PEMBAHASAN revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terancam menemui jalan buntu. Senayan dan pemerintah belum sepakat soal kehadiran kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam (BNPB) dalam undang-undang.

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengatakan, pembahasan revisi UU Penanggulangan Bencana ini sudah dibahas kurang lebih dua tahun. Masalahnya, pemerintah merasa pelembagaan BNPB tidak perlu diatur. Sebaliknya, DPR menilai wajib memasukkan redaksi 'BNPB' sebagai upaya penguatan dan pengkoordinasian terhadap setiap upaya penanggulangan bencana.

"Kami semua di fraksi Komisi VIII sepakat, sepakat, dan sepakat. Tidak ada lonjong, tidak ada bengkok-bengkok. Bahwa kami ingin memperkuat BNPB baik dari sisi kelembagaan, koordinasi maupun mandatory budgetting," tegas Yandri, kemarin.

Yandri menilai, kinerja BNPB selama ini sudah luar biasa dalam melakukan setiap upaya penanggulangan bencana. Hal ini dirasakannya betul sejak duduk di komisi bidang sosial, haji, dan penanggulangan bencana pada 2019.

Sayangnya, pengaturan

BNPB ini dalam undang-undang justru belum ada titik temu. Padahal, beberapa kementerian yang sudah diundang hadir membahas revisi undang-undang tersebut, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, termasuk Menteri Keuangan setuju penguatan BNPB ini.

"Tapi Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai *leading sector* sampai hari ini kata-kata BNPB masih hilang dalam revisi undang-undang ini," jelasnya.

Politisi Fraksi PAN ini menegaskan, tak ingin dirinya bersama anggota lainnya dicap dalam sejarah sebagai pihak yang merestui pembubaran BNPB ini. Karenanya, jika nomenklatur BNPB dalam revisi undang-undang ini hilang, maka diputuskan pembahasannya untuk dihentikan. "Artinya kalau sampai saat ini belum ada kesepakatan, *deadlock*, kami akan drop undang-undang ini," tegasnya.

Sehingga, sambung dia, undang-undang yang ada saat ini tetap dinyatakan berlaku. BNPB tetap hadir sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana yakni melalui dukungan anggaran. Termasuk koordinasi yang lebih terpadu baik dengan mitra, lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah. ■ KAL